



**METODE PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP MODEL KESERENTAKAN PEMILU DALAM
PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

METODE PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MODEL KESERENTAKAN PEMILU DALAM PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL

Sri Rahmadhani, NIM 2320112014, 142 Halaman, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya metode penafsiran yang jelas dalam menetapkan sebuah putusan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya juga berlaku terhadap pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar, mengenai model keserentakan pemilu. Pasca keluarnya Putusan MK tentang pengujian terhadap UU Pemilu, maka secara otomatis harusnya putusan tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu periode selanjutnya di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pergeseran metode penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi terhadap model keserentakan pemilu dengan rumusan masalah 1) Bagaimana penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait model keserentakan pemilu dalam pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana implikasi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap asas keberkalaan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, metode penafsiran yang digunakan oleh MK sebelumnya adalah pendekatan *Originalism* dengan metode *Original Intent*. Pasca putusan MK dikeluarkan, terjadi pergeseran metode penafsiran oleh MK menjadi pendekatan *Non-originalism* dengan metode *ethical*. Hal ini didasari pada pertimbangan hakim terkait penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif karena jarak waktu yang sedikit antara pemilu dan pilkada tahun 2024, selanjutnya pemilih yang bingung dalam menentukan pilihannya karena banyaknya pemilihan dan pemilih cenderung memperhatikan calon pemimpin pusat dari pada calon pemimpin daerah, di samping itu dari segi partai politik yang kesulitan menyiapkan kadernya karena jarak waktu yang singkat. Lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan pemilu yang diputus oleh MK melalui putusan terbaru, Mahkamah Konstitusi memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama dua (2) tahun (6) enam bulan setelah pemilu nasional. Perubahan berdasarkan amar putusan MK terbaru, berdampak pada asas keberkalaan yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) sehingga mengalami perubahan atau transisi, khususnya pada pelaksanaan pemilu lokal. Pemilu yang awalnya dilaksanakan pada tahun 2029 berubah menjadi tahun 2031. Dengan demikian implikasi yang ditimbulkan dari putusan ini adalah adanya jarak waktu yang cukup jauh bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan penyelenggaraan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, pemilih dapat menentukan pilihannya dengan baik, karena dapat mengenal calon pemimpin dengan jelas tanpa menggabungkan antara calon pemimpin nasional dan calon pemimpin daerah, serta partai politik memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kadernya.

Kata Kunci: Metode Penafsiran, Mahkamah Konstitusi, Model Keserentakan Pemilu.

THE CONSTITUTIONAL COURT'S METHOD OF INTERPRETATION OF THE SIMULTANEOUS ELECTION MODEL IN SEPARATING NATIONAL ELECTIONS AND LOCAL ELECTIONS

**(Sri Rahmadhani, NIM 2320112014, 142 page, Master of Law Study Program, Faculty of
Law, Andalas University, 2026)**

ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of a clear interpretation method in determining a decision by the authorized institution, namely the Constitutional Court. This of course also applies to the judicial review of the Election Law against the Constitution, regarding the model of simultaneous elections. After the issuance of the Constitutional Court Decision on the judicial review of the Election Law, the decision should automatically become the basis for holding the next period of elections in Indonesia. This research aims to examine the shift in the method of interpretation by the Constitutional Court towards the model of simultaneous elections with the formulation of the problem 1) What is the interpretation used by the Constitutional Court regarding the model of simultaneous elections in the judicial review of the Law on General Elections? 2) What are the implications of the shift in the method of interpretation of the Constitutional Court towards the principle of periodic elections in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? This research is a normative research method with a conceptual approach, a case approach and a comparative approach. The results of this research found that the method of interpretation used by the Constitutional Court previously was the Originalism approach with the Original Intent method. After the Constitutional Court decision was issued, there was a shift in the method of interpretation by the Constitutional Court to the Non-originalism approach with the ethical method. This is based on the judge's considerations regarding the election organizers who cannot carry out their duties effectively due to the short time gap between the general election and the 2024 regional elections, furthermore voters are confused in determining their choice due to the large number of elections and voters tend to pay attention to central leader candidates rather than regional leader candidates, in addition to that from the perspective of political parties who have difficulty preparing their cadres due to the short time gap. Furthermore, the election implementation mechanism decided by the Constitutional Court through the latest decision, the Constitutional Court separates between national elections and local elections. Local elections are held at least 2 (two) years or at most two (2) years (6) six months after the national elections. Changes based on the latest Constitutional Court decision have an impact on the principle of periodicity that has been regulated in Article 22E paragraph (1) so that it experiences changes or transitions, especially in the implementation of local elections. The election which was originally held in 2029 has been changed to 2031. Thus, the implications of this decision are that there is a sufficient time gap for election organizers to prepare for the implementation of national elections and local elections, voters can make their choice well, because they can get to know the candidate leaders clearly without combining national and regional leader candidates, and political parties have sufficient time to prepare their cadres. **Keywords:** Interpretation Methods, Constitutional Court, Election Simultaneity Model.*